

DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI) DALAM MENANGANI KONFLIK ROHINGYA

Dio Rofi Sanyoto

Setyasih Harini, S.IP., M.Si

Drs. GPH Dipokusumo, M.Si

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

This research described and analyzed diplomacy conducted by Indonesia Government concerning Organization of Islamic Cooperation in dealing with Rohingya conflict. Rohingya Conflict formerly constituting a Myanmar's internal state conflict goes global. It was because the effect was felt not only by Myanmar or corresponding ethnic but also felt by Myanmar's neighbor states including Indonesia. As the state affected by the conflict, Indonesia took some attempts to deal with Rohingya Conflict. Out of some attempts taken by Indonesia, there was a multilateral diplomatic taken by Indonesia concerning international organization. One of those international organizations was Islam-based International Organization, Organization of Islamic Cooperation. The author employed Multilateral Diplomacy with Human Right approach. The objective of research was to find out what diplomatic attempt Indonesia had taken on Organization of Islamic Cooperation in dealing with Rohingya Conflict. The research method employed in this study was qualitative research one with primary and secondary data. Data collection was conducted using interview and documentation methods and the data collected was analyzed descriptively.

. From the data of research, the author found that diplomatic attempts Indonesia had taken against Organization of Islamic Cooperation had not been maximal due to some constraints.

Keywords: Multilateral Diplomacy, Republic of Indonesia Government, Organization of Islamic Cooperation, Myanmar Government

A. PENDAHULUAN

Negara Burma yang kemudian disebut dengan negara Myanmar adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki etnis yang beraneka ragam. Pergantian nama dari negara Burma menjadi Union of Myanmar pada 18 September 1989 mempunyai tujuan untuk menyatukan etnis-etnis di dalam negara tersebut menjadi satu kesatuan negara Myanmar. terdapat 135 etnis yang diakui di Myanmar diantaranya adalah Mon, Cina, India, Rakhine, Burma dan Shan. Kemudian terdapat satu etnis di Myanmar yang

tidak diakui oleh pemerintah Myanmar yaitu etnis Arakan atau yang sekarang lebih dikenal dengan etnis Rohingya (Tiara Ayu, 2016).

Etnis Rohingya adalah etnis bergama Islam, sedangkan sebagian warga negara Myanmar merupakan pemeluk agama Budha. Sehingga etnis Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar. Etnis tersebut menempati salah satu wilayah Myanmar yaitu negara bagian Rakhine. Pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingya

terdiri dari orang Bengali yang kemudian melakukan perjalanan secara *illegal* ke Myanmar atau imigran gelap. Pemerintah Myanmar mempertegas status kewarganegaraan etnis Rohingya melalui kebijakan yang dikeluarkan berbentuk Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982. Dalam UU tersebut, etnis Rohingya bukan termasuk dalam etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar sebagai etnis asli. Menurut UU tersebut, etnis Rohingya tidak mempunyai dokumen-dokumen yang dapat membuktikan mengenai kewarganegaraannya di Myanmar (Syarifatul Ula, 2017).

Keberadaan etnis Rohingya yang tidak diakui oleh pemerintah Myanmar tersebut menyebabkan etnis Rohingya sulit untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Etnis Rohingya mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak atas tempat tinggal serta hak untuk mendapat pelayanan di dalam negeri Myanmar. Misalnya, etnis Rohingya tidak memiliki kartu identitas sehingga sulit bagi etnis Rohingya mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, kesulitan dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan karena tingkat kemiskinan yang tinggi.

Sikap pemerintah Myanmar yang acuh terhadap etnis Rohingya kemudian berlanjut menjadi diskriminasi. Diskriminasi tersebut ditunjukkan oleh pemerintah yang menganggap etnis Rohingya yang beragama Islam adalah minoritas yang hidup di tengah-tengah masyarakat Myanmar yang sebagian besar beragama Buddha. Perwujudan dari diskriminasi tersebut disertai dengan tindak penindasan, kerja paksa, pemerasan dengan menggunakan kekerasan. Pemerintah Myanmar tidak mengubah kebijakannya atas etnis Rohingya, namun hanya memberikan solusi. Solusi tersebut adalah memilih antara memindahkan etnis Rohingya ke

negara lain atau tetap tinggal di wilayah Rakhine namun di bawah pengawasan PBB (Anna Yulia, 2015).

Selain pemerintah Myanmar, keberadaan etnis Rohingya juga tidak diakui oleh masyarakat asli Myanmar khususnya etnis Rakhine. Etnis Rakhine merupakan etnis yang menempati sebagian besar wilayah Rakhine. Etnis Rakhine tersebut merupakan pemeluk agama Buddha. Hubungan antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine sangat tidak baik serta sering terjadi konflik sektarian antara keduanya. Puncak dari konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine adalah pada saat terjadinya tragedi Rakhine tahun 2012. Penyebab dari tragedi tersebut adalah terdapat seorang perempuan yang berasal dari etnis Rakhine diperkosa dan dibunuh yang tindakan tersebut dipertanggungjawabkan kepada etnis Rohingya. akibatnya, etnis Rakhine melakukan tindakan balas dendam berupa pembantaian secara besar-besaran terhadap etnis Rohingya (Zinda Rahma, 2014).

Penyebab lain etnis Rakhine tidak bisa menerima keberadaan etnis Rohingya adalah adanya kecemburuan sosial dan rasa khawatir. Kecemburuan sosial karena terdapat peningkatan terhadap populasi etnis Rohingya di Rakhine dalam keadaan yang sedang genting karena terjadi konflik. Kemudian, etnis Rakhine khawatir apabila populasi etnis Rohingya terus meningkat maka akan mengurangi hak lahan yang dimiliki oleh etnis Rakhine. Hal tersebut membuat konflik yang terjadi semakin meningkat dan membuat keadaan di Rakhine semakin memburuk.

Konflik Rohingya yang awalnya merupakan konflik antar etnis meluas menjadi konflik kawasan hingga internasional. Etnis Rohingya terus menerus mengalami tindakan

diskriminasi yang menggunakan kekerasan. Akibat mengalami penindasan dan kekerasan yang terus menerus, sebagian besar dari etnis Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga Myanmar antara lain Bangladesh yang menjadi tujuan utama oleh para korban kekerasan Rohingya karena letak geografisnya paling dekat dengan negara Myanmar. Selain Bangladesh, etnis Rohingya juga melakukan perjalanan hingga ke negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang menjadi tujuan dari pengungsi Rohingya, Indonesia turut merasakan dampak dari konflik tersebut. Pengungsi yang berdatangan ke

Bentuk diplomasi Indonesia terhadap Organisasi Kerja sama Islam (OKI) merupakan diplomasi multilateral yang menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian dalam menangani konflik Rohingya, Indonesia menggunakan pendekatan dengan *soft diplomacy* yang disebut *constructive engagement*. Indonesia berupaya mendorong OKI untuk menggunakan pendekatan konstruktif tersebut dalam menangani konflik Rohingya sehingga dapat mencapai tujuan dan kepentingan bersama tanpa menggunakan kekerasan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti akan memaparkan mengenai bagaimana diplomasi Indonesia terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menangani konflik Rohingya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji dan menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan

Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga pada puncaknya pada tahun 2015. Peningkatan jumlah pengungsi tersebut apabila tidak segera ditangani maka akan mengancam stabilitas nasional Indonesia. Hal tersebut mendorong pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk menangani konflik Rohingya. Indonesia melakukan berbagai jenis upaya, antara lain adalah memberikan bantuan kepada korban konflik, melakukan diplomasi bilateral terhadap pemerintah Myanmar dan melakukan upaya diplomasi multilateral terhadap organisasi internasional. Salah satu bentuk diplomasi multilateral yang sedang dilakukan oleh Indonesia pada saat ini adalah diplomasi terhadap Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

memahami mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian. Menurut Flick (2014 dalam Kohmahriah, 2017) mengatakan bahwa keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi kehidupan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah reduksi dengan cara memfokuskan atau menajamkan topik bahasan yang dipilih, penyajian data adalah menyaring keseluruhan data yang didapatkan kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata narasi dan deskriptif, dan verifikasi data yang maksudnya adalah menyeleksi sumber data yang valid sehingga dapat memberikan data yang kredibel.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti mendapatkan data primer melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kemudian untuk data sekunder yang

digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian diperoleh dari buku, jurnal, skripsi atau tesis, artikel ilmiah dan berita yang berasal dari media online. Dalam penelitian ini, terdapat narasumber yang dipilih dalam melakukan wawancara yaitu Diplomat yang pernah bertugas di Myanmar tahun 1986-1989, Andika Bambang Supeno. Narasumber selanjutnya adalah mahasiswa yang berasal dari Myanmar dan beragama Buddha, Chit Tell.

Rakhine merupakan negara bagian yang terdiri dari beberapa desa. Desa-desa tersebut merupakan tempat tinggal etnis Rohingya dan etnis Rakhine. Keduanya tinggal dalam satu wilayah namun terus mengalami gesekan hingga mengakibatkan konflik sektarian yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Etnis Rohingya yang dianggap bukan merupakan warga negara asli Myanmar sebenarnya sudah menempati wilayah Myanmar tersebut sejak abad ketujuh.

Awalnya agama Islam mulai memasuki Myanmar pada abad ketujuh melalui pedagang Arab. Pada saat itu terdapat tiga keyakinan di Myanmar yaitu Hindu, Buddha dan animisme. Kemudian adanya pernikahan antara pimpinan pedagang Arab dengan masyarakat asli maka terjadilah akulturasi agama dan kebudayaan sehingga membuat seluruh rakyat Arakan atau yang sekarang disebut Rakhine menjadi pemeluk agama Islam. Setelah itu, pada tahun 957 terjadi konflik yang menyebabkan terbunuhnya raja dari kerajaan Hindu oleh serangan yang berasal dari bangsa Mongol. Kemudian terjadi migrasi besar-besaran dari besar-besaran yang menyebabkan bercampurnya ras India dan Indo-Burma yang kemudian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Represif Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya

Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas Muslim yang berada di Myanmar. Etnis tersebut menempati wilayah negara bagian Rakhine yang mempunyai penduduk asli bernama etnis Rakhine

menjadi Bangsa Rakhine. Pada tahun 1606, etnis Mughal datang ke Arakan dengan menggunakan pendekatan kepada kaum sufi dan pedagang Arab. Komunitas Muslim yang ada di Arakan sudah terbentuk dari abad ke-7. Komunitas Muslim tersebut terdiri dari berbagai ras dan suku yang bergabung menjadi komunitas Muslim Rohingya. Kemudian pada tahun 1784, kerajaan Arakan diserang oleh kerajaan Burma dan terjadi pembantaian yang melibatkan komunitas Muslim Rohingya dan komunitas Buddha Arakan. Akibat dari peristiwa tersebut, sekitar 200.000 warga Arakan mengungsi ke Bengal (Alhaq, 2017).

Pada masa kolonialisme, Inggris memasuki Myanmar pada tahun 1824. Terdapat perjanjian Yandabo yang mengatur mengenai masuknya kerajaan Burma pada wilayah administrasi negara persemakmuran Inggris-India. Pada masa penjajahan, Inggris membawa pekerja dari India dalam jumlah yang besar. Terdapat petani musiman berasal dari Bengal yang dipekerjakan oleh Inggris sehingga membuat kemarahan petani Burma sehingga terjadi gelombang nasionalisme. Pada tahun 1937 Masehi, Inggris menyatukan kembali Burma dengan Arakan. Penyatuan kembali oleh

Inggris tersebut disertai dengan provokasi kepada etnis Buddha sehingga menyebabkan tindak kekerasan dan penindasan terhadap etnis Muslim Rohingya pada tahun 1938 yang kemudian terjadi pada tahun-tahun berikutnya (Waluyo, T.J. 2012).

Memasuki masa transisi antara Inggris dan Jepang, etnis Rakhine dan etnis Rohingya mulai dimanfaatkan oleh para penjajah. Dalam rangka upaya Jepang ingin mendapat kekuasaan secara penuh, maka Jepang melakukan upaya untuk mengalahkan Inggris yang sudah lebih dulu menduduki Myanmar. Jepang bekerjasama dengan etnis Buddha untuk mengalahkan Inggris dan sebaliknya, Inggris memberikan senjata kepada etnis Muslim Rohingya untuk berjuang melawan Jepang. Pembantaian kembali terjadi sehingga membuat etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Tindakan melarikan diri yang dilakukan oleh etnis Rohingya karena konflik Inggris dan Jepang membuat Rohingya dicap sebagai pemberontak (Alhaq, 2017).

Selanjutnya adalah pada masa proses menuju kemerdekaan Myanmar. Pada saat proses menuju kemerdekaan, konflik keagamaan yang terjadi justru semakin meningkat dan kedua etnis tersebut semakin sensitif. Adanya propaganda yang diciptakan oleh Inggris menyebabkan hubungan etnis Rohingya dengan etnis Buddha semakin tidak baik. Etnis Muslim Rohingya mempunyai tujuan untuk dapat segera memperoleh kemerdekaan, hal tersebut memicu kemarahan etnis Buddha yang ditekan oleh pemerintah untuk membuat etnis Muslim Rohingya tetap sebagai warga asing yang tidak resmi atau disebut *Foreigners Illegally*.

Dari 135 etnis yang terdapat di Myanmar, etnis Rohingya ialah satu-satunya etnis yang tidak mendapat pengakuan dari pemerintah Myanmar. Pemerintah beranggapan bahwa etnis Rohingya adalah orang Bengali yaitu sebutan bagi salah satu suku yang ada di Bangladesh, kemudian orang Bengali tersebut dianggap menjadi imigran gelap atau pendatang yang tidak resmi di negara Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Orang Bengali tersebut kemudian berubah menjadi etnis Rohingya atau pemerintah Myanmar biasa menyebutnya orang muslim. Etnis Rohingya juga tidak mendapat pengakuan dari pemerintah Bangladesh, akibatnya etnis tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan atau *stateless*. Selain tidak mempunyai pengakuan kewarganegaraan, menurut PBB etnis Muslim Rohingya merupakan etnis minoritas yang paling teraniaya (*most persecuted ethnic*) (Gulia I Mitzy, 2014).

Kebijakan Pemerintah Myanmar atas Etnis Rohingya

Etnis Rohingya sudah mengalami diskriminasi dari mulai tahun 1948, tepatnya ketika Inggris membagi etnis yang ada di wilayah Rakhine, yaitu etnis Muslim Rohingya dan etnis Buddha Myanmar yang diakui sebagai warga negara asli Myanmar. Pada tahun 1978, Jendral Ne Win yang pada saat itu memimpin Myanmar melakukan sensus penduduk atau disebut juga dengan operasi Naga Min kepada seluruh rakyat Myanmar. Operasi tersebut menghasilkan tindakan pembunuhan yang dilakukan secara besar-besaran dan meluas, pemerkosaan, dan penganiayaan terhadap etnis Rohingya. Akibatnya, sekitar 200.000 etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar karena tidak tahan dengan

kekejaman pada masa itu. Kemudian pada tahun 1982 muncul kebijakan Burma Citizenship Law (BCL), kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintahan militer yang saat itu menguasai Burma-Myanmar yaitu Jendral Ne Win. Kebijakan tersebut berisikan mengenai status kewarganegaraan etnis Rohingya di Myanmar yaitu menjelaskan bahwa etnis Rohingya bukan merupakan warga negara Myanmar sehingga etnis tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan hak atas tanah, hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan. Etnis Rohingya tidak mempunyai hak atas tanah yang berarti tidak mempunyai ijin resmi untuk mendirikan bangunan untuk tempat tinggal. Kemudian Pemerintah Myanmar tidak berkenan untuk memberikan kartu identitas kepada etnis Rohingya yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Kebijakan tersebut berhasil membuat sekitar 300.000 orang etnis Rohingya melarikan diri karena tidak bisa bertahan dari praktik-praktik kekejaman pemerintah Myanmar seperti kerja paksa, penyiksaan dan pemerkosaan perempuan, pemungutan pajak secara sewenang-wenang dan penyiksaan (Nabila, Fasha. 2017).

Di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi yang merupakan pemimpin *de facto* Myanmar juga belum memberikan pengakuan terhadap etnis Rohingya. Aung San Suu Kyi menganggap bahwa etnis Rohingya merupakan teroris karena etnis tersebut dianggap banyak melakukan hal-hal yang radikal dan ekstrim. Pemimpin yang berasal dari partai *National League for Democracy* (NLD) tersebut mengatakan bahwa tidak ada Rohingya di negara Myanmar. Rohingya bukan merupakan etnis yang berasal dari

Myanmar dan tidak akan pernah menjadi warga negara Myanmar. Seperti rezim pemerintahan sebelumnya, etnis Rohingya hanya dianggap sebagai imigran gelap yang berasal dari Bangladesh sehingga kebijakan pemerintah Myanmar hingga saat ini adalah upaya mengembalikan etnis Myanmar yang bermukim di tempat pengungsian di wilayah Rakhine ke Bangladesh. Pemerintah Myanmar tidak memiliki kebijakan yang mengatur dan mengizinkan mengenai negosiasi dengan kelompok-kelompok pemberontak dari Rohingya yang menginginkan persamaan hak dan wilayah otonomi. Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya merupakan sebuah kelompok yang sudah menyebabkan timbulnya berbagai masalah di wilayah Rakhine. Masalah-masalah tersebut dianggap merugikan warga asli yang merupakan etnis Rakhine yang bergama Buddha.

Bentuk Tindakan Teror Pemerintah Myanmar Kepada Etnis Rohingya

Pada bulan Juni tahun 2012, setelah terjadi pembantaian oleh etnis Rakhine yang beragama Buddha dengan etnis Muslim Rohingya maka wilayah Rakhine ditetapkan kondisi darurat militer oleh pemerintah Myanmar. Kemudian pemerintah Myanmar mengirimkan pasukan bersenjata berat ke wilayah konflik tersebut. Kedatangan pasukan bersenjata berat yang seharusnya mengurangi konflik dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Rakhine namun justru membuat keadaan semakin carut-marut. Tentara pemerintah Myanmar tersebut melakukan penembakan kepada etnis Rohingya yang beragama Islam karena dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh. Aparat yang

dikirim oleh pemerintah tersebut juga terlibat dalam aksi pemerkosaan dan pembunuhan, selain itu aparat tersebut terlibat dalam penangkapan etnis Rohingya secara massal pada saat terjadi kerusuhan antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine.

Kemudian kembali terjadi konflik antara etnis Rohingya dengan aparat militer yang ditugaskan oleh pemerintah Myanmar pada 9 Oktober 2016, penyebab konflik tersebut adalah terbunuhnya 9 penjaga perbatasan Myanmar yang diduga merupakan perbuatan dari etnis Rohingya. Akibat dari kejadian tersebut terdapat kurang lebih 100 orang terbunuh, ratusan orang lainnya ditahan oleh aparat militer, beberapa wanita dari etnis Rohingya mengaku sebagai korban pemerkosaan dan ribuan pengungsi yang terlantar tidak diperbolehkan untuk mendapat makanan, obat-obatan dan kebutuhan vital lainnya. Selain kekerasan yang menimpa etnis Rohingya, terdapat 1200 bangunan yang sudah rata dengan tanah dan 30 orang tercatat telah melarikan diri dari Rakhine (Indah Angraini, 2017).

Sebelum terjadinya pembantaian penjaga perbatasan Myanmar, terdapat rencana pemerintah Myanmar mengenai penggusuran bangunan-bangunan di Rakhine. Bangunan-bangunan yang akan digusur tersebut ditempati oleh etnis Rohingya dan dianggap *illegal* oleh pemerintah Myanmar. Terdapat rumah, masjid dan sekolah yang akan digusur oleh pemerintah (Indah Angraini, 2017). Pemerintah telah membakar ratusan desa yang menjadi tempat tinggal etnis Rohingya seperti yang digambarkan oleh PBB dalam "*textbook example of ethnic cleansing*" (Aulia Rossa, 2018).

Pemerintah Myanmar juga memberikan wewenang kepada otoritas negara Rakhine untuk terlibat dalam proses penghancuran bangunan yang ditempati oleh etnis Rohingya dengan skala kecil. Seperti contohnya di daerah Kota kecil Buthidaung yang sudah ditinggalkan oleh etnis Rohingya, namun hal tersebut tidak disebabkan karena adanya pembakaran oleh pemerintah melainkan disebabkan rasa ketakutan dari etnis Rohingya yang menempati daerah tersebut atas ancaman pembunuhan, kekerasan dan wabah kelaparan. Sehingga etnis Rohingya melarikan diri ke daerah lain untuk mencari perlindungan (Amnesti Internasional, 2018)

Pemusnahan bangunan oleh pemerintah masih terus terjadi hingga awal tahun 2018. Namun, pemusnahan bangunan tersebut dilakukan dengan cara yang lebih terencana dan memiliki target-target tertentu tidak seperti pada pemusnahan yang terjadi di bulan Agustus dan September 2017. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran pemerintah jika membakar secara besar-besaran akan berdampak pada desa-desa masyarakat Rakhine asli (Amnesti Internasional, 2018).

Amnesti Internasional menjelaskan bahwa terdapat laporan mengenai adanya penghancuran bangunan keagamaan seperti masjid oleh pemerintah. Pemerintah sudah merencanakan dan menargetkans erangan tersebut pada akhir Desember 2017. Penghancuran tersebut tidak menggunakan api melainkan dengan cara penjarahan yang dimulai pada bulan Agustus 2017 kemudian sempat terhenti pada bulan Desember 2017 dan dimulai lagi pada bulan Januari 2018. Pada awal Februari di daerah Zin Paing Nyar sudah dalam keadaan rata dengan tanah, bangunan

keagamaan selain masjid yaitu madrasah dan rumah-rumah besar juga ikut dimusnahkan oleh pemerintah.

Rencana pemerintah untuk memusnahkan bangunan-bangunan tempat tinggal dan infrastruktur Rohingya dari tahun ke tahun memiliki proses yang nyata. Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melaksanakan *ethnic cleansing*. Dengan adanya pembakaran menimbulkan rasa takut etnis Rohingya yang menempati desa-desa di daerah *Rakhine State* dan membuatnya melarikan diri meninggalkan Myanmar untuk mencari perlindungan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Etnis Rohingya sudah ada sejak negara Myanmar belum merdeka. Agama Islam masuk ke Myanmar melalui para pedagang Arab dan adanya pengaruh faktor asimilasi kebudayaan Buddha dan Islam, sedangkan pemerintah mempunyai sudut pandang bahwa etnis Muslim Rohingya adalah sekelompok masyarakat Bengali yang datang dari Bangladesh karena membutuhkan pekerjaan pada zaman penjajahan Inggris. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan etnis Muslim Rohingya dan etnis Muslim Rakhine pada saat penerapan kebijakan kewarganegaraan oleh pemerintah.

Penolakan Masyarakat Asli Myanmar atas Etnis Rohingya

Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas Muslim yang hidup di tengah-tengah etnis asli Rakhine yang beragama Buddha. Hubungan antar etnis yang melibatkan dua keyakinan yang berbeda tersebut sangat tidak baik. Sebagai etnis pribumi Myanmar, etnis Rakhine sangat menentang keberadaan Rohingya di Rakhine State. Hal tersebut diperburuk dengan

adanya kebijakan pemerintah Myanmar yang menegaskan bahwa etnis Rohingya bukan warga negara asli Myanmar, etnis tersebut merupakan imigran gelap yang datang dari Bangladesh. Mengetahui kebijakan tersebut, etnis Rakhine memperlakukan etnis Rohingya dengan sangat buruk.

Genocide

Genosida merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan atau membersihkan suatu kelompok etnis tertentu. Pengertian genosida secara yuridis adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan dan menghancurkan sebagian besar atau seluruh kelompok bangsa, rasa, etnis atau agama. Pengertian tersebut terdapat dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* atau disebut juga Konvensi Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida pada tahun 1948 yang kemudian dicantumkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Turangan, Doortje D.2011). Beberapa waktu berlalu dengan keadaan etnis Rohingya yang tidak mengalami banyak perubahan justru semakin memburuk sampai pada saat puncak tragedi pada tahun 2012. Pada tahun 2012 terjadi tragedi berdarah secara bedar-besaran di Myanmar yang dikenal sebagai “Tragedi Rakhine” (Deutsche, Welle. 2017).

Tragedi Rakhine pada Juni 2012 tersebut diawali dengan adanya peristiwa gadis Buddha yang diperkosa kemudian dibunuh. Peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan tersebut menuding etnis Rohingya sebagai pelaku. Tiga hari berselang setelah peristiwa tersebut,

masyarakat etnis Rakhine yang berjumlah 300 orang menyerang bus yang berisi etnis Rohingya. Serangan tersebut menewaskan 10 orang dari etnis Rohingya (Zinda Rahma, 2016. 2). Setelah peristiwa tersebut, terdapat serangan dari etnis Rakhine yang merusak bangunan-bangunan milik etnis Rohingya sekitar 5000 bangunan dimusnahkan pada saat itu. Selain bangunan, serangan tersebut juga mengakibatkan terbunuhnya sekitar 70 warga etnis Rohingya yang 28 diantaranya adalah anak-anak.

Peristiwa-peristiwa kekerasan terus berlangsung hingga saat ini memicu etnis minoritas tersebut untuk melakukan serangan balasan. Serangan balasan tersebut antara lain adalah ketika para gerilyawan Rohingya menyerang pos keamanan dan membunuh polisi yang sedang

Sudut Pandang Masyarakat Myanmar terhadap Rohingya

Masyarakat Myanmar memandang bahwa etnis Muslim Rohingya merupakan sekelompok orang yang tidak mempunyai pengakuan dari pemerintah sebagai warga negara. Hal tersebut mempengaruhi sudut pandang masyarakat Myanmar kepada etnis

- Menempati wilayah yang bukan merupakan hak milik etnis Rohingya. Selama ini, etnis Rohingya menempati wilayah negara bagian Rakhine yang 60% dari wilayah tersebut ditempati oleh etnis Rakhine yang beragama Buddha. Tempat tinggal etnis Rohingya tersebut dianggap *illegal* karena mereka tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah Myanmar atas bangunan-bangunan tersebut

bertugas. Mengetahui hal tersebut dengan sigapnya serangan tersebut mendapat respon dari masyarakat dengan campur tangan pemerintah yaitu adanya operasi militer yang bertujuan untuk membunuh para gerilyawan dan kelompok pemberontak etnis Rohingya (Deutsche Welle, 2017).

Etnis Rohingya kembali melakukan serangan ke wilayah perbatasan dengan Bangladesh, serangan tersebut dilakukan oleh 100 Muslim bersenjata. Serangan yang terjadi pada 25 Agustus 2017 tersebut mengakibatkan pasukan keamanan Myanmar dan etnis Muslim Rohingya saling menuduh. Akibatnya, desa-desa dibakar oleh pemerintah bersama dengan masyarakat Buddha Rakhine dan kembali terjadi pembunuhan massal (Deutsche Welle, 2017).

Muslim Rohingya menjadi cenderung negative. Etnis Rohingya merupakan etnis asing yang berasal dari Bangladesh. Menurutnya, etnis Rohingya yang tidak diakui pemerintah ini melakukan berbagai hal yang membuat masyarakat asli Myanmar tidak bisa menerima keberadaan etnis Rohingya. Hal-hal yang dilakukan oleh etnis Rohingya antara lain adalah

- (wawancara dengan Chit Tell pada 5 Agustus 2018).
- Eksploitasi SDA Menurut masyarakat asli Myanmar, etnis Rohingya tidak hanya menempati wilayah Rakhine secara *illegal* namun juga melakukan eksploitasi sumber daya alam secara *illegal* untuk memenuhi kebutuhan sehari-seharinya (wawancara dengan Chit Tell pada 5 Agustus 2018).
- Menghina etnis Buddha Myanmar

Masyarakat asli Myanmar menilai bahwa etnis Rohingya bersikap keterlaluhan karena sudah mengeksploitasi sumber daya alam tetapi justru menghina etnis Buddha (wawancara dengan Chit Tell pada 5 Agustus 2018).

- Mencoba membuat konflik agama dan penyebab perang di Myanmar

Dari sekian banyak konflik yang terjadi antara etnis Muslim Rohingya dengan etnis Buddha, masyarakat asli Myanmar beranggapan bahwa sebenarnya etnis Rohingya lah yang menyebabkan konflik-konflik agama tersebut (wawancara dengan Chit Tell pada 5 Agustus 2018).

- Perilaku etnis Rohingya yang buruk

Menurut masyarakat asli Myanmar, etnis Rohingya sering berperilaku buruk dengan melakukan hal-hal yang membahayakan masyarakat Myanmar. (wawancara dengan Chit Tell pada 5 Agustus 2018).

Pelayanan Pendidikan dan Rumah Sakit Swasta

Kondisi etnis Rohingya yang tidak mendapat pengakuan dari pemerintah Myanmar sangat mempengaruhi hak-hak dasar yang seharusnya didapatkan oleh seorang warga negara. Hak-hak dasar tersebut antara lain adalah hak hidup, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapat pekerjaan yang layak dan yang lain sebagainya. Berbeda dengan etnis lain yang diakui keberadaannya oleh

Myanmar, etnis Rohingya tidak mendapatkan hak-hak dasar tersebut. Etnis Rohingya sering mengalami perlakuan yang tidak pantas dari mulai ditindas sampai dibunuh sehingga dapat dikatakan etnis tersebut tidak memiliki hak untuk hidup, tidak ada oknum yang bersedia untuk melindungi etnis Rohingya sebagai warga negara, etnis Rohingya juga tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada pelayanan kesehatan yang tersedia untuk etnis Rohingya.

Kehidupan etnis Rohingya sangat bergantung kepada bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh negara lain. Keseharian etnis Rohingya yang selalu mengalami diskriminasi dengan kekerasan membuat etnis tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Pembakaran yang terjadi setiap saat bukan hanya memusnahkan pemukiman Muslim Rohingya di Rakhine, namun karena pembakaran tersebut bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat turut dibumi hanguskan. Selain masjid, terdapat bangunan lain yang terkena pembakaran di desa Alel Than Kyaw berupa sebuah klinik yang dikelola oleh badan amal Medecins Sans Frontieres (Dokter Lintas Batas) ditemukan sudah rata dengan tanah (BBC, 2017).

Perlakuan buruk yang diterima oleh etnis Rohingya dari sejak pasca perang dunia ke II tersebut membuat terbentuknya kelompok militan Rohingya yang bernama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). ARSA merupakan tentara Pembebasan Muslim Arakan yang mulai dikenal pada tahun 2017 (Republika, 5 September 2017). Terdapat beberapa orang dari etnis Rohingya yang memperoleh *National Registrations Card (NRC)* dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur

yang telah diterapkan oleh kantor imigrasi Myanmar. Etnis Rohingya juga menggunakan cara-cara yang illegal untuk dapat pergi ke sekolah dan menggunakan rumah sakit. Tetapi sebagian besar etnis Rohingya buta huruf dan dianggap menjalani hidup dengan caranya sendiri (wawancara dengan Chit Tell, pada 5 Agustus 2018). Analisa yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sudut pandang masyarakat Myanmar terhadap etnis Rohingya adalah menganggap bahwa etnis tersebut merupakan kelompok yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Masyarakat Myanmar menganggap etnis Rohingya bersikap serakah karena telah menempati wilayah Rakhine dan menggunakan sumber daya alam yang ada di dalamnya secara *illegal*. Konotasi negatif yang selalu disematkan oleh masyarakat Myanmar terhadap etnis Rohingya tersebut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar tidak memperdulikan mengenai sejarah bahwa sebenarnya etnis Rohingya sudah berada di Myanmar sejak beberapa abad yang lalu. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang menjelaskan bahwa etnis Rohingya bukan merupakan etnis asli yang berasal dari Myanmar maka etnis Muslim tersebut hanya dianggap sebagai imigran gelap yang berasal dari Bangladesh. Sebagai warga negara yang diakui oleh pemerintah, maka masyarakat asli Myanmar mematuhi kebijakan pemerintah Myanmar atas etnis Rohingya tersebut dan turut melakukan berbagai sikap penolakan terhadap etnis Rohingya.

Selain faktor kebijakan pemerintah, alasan masyarakat asli Myanmar menolak keberadaan etnis Rohingya adalah karena jumlah masyarakat asli yang beragama Buddha lebih banyak dibandingkan

dengan etnis yang beragama Islam, Hindu dan Kristen yang ada di Myanmar. Berdasarkan memiliki jumlah masyarakat terbesar maka muncul rasa untuk mendominasi komunitas yang lebih lemah. Rasa ingin mendominasi tersebut diwujudkan dengan adanya diskriminasi dan penindasan terhadap etnis Rohingya. Etnis Buddha Rakhine memperlakukan etnis Rohingya dengan sangat buruk, seringkali terjadi konflik sektarian membuat etnis Rohingya semakin lemah. Perlakuan buruk yang dilakukan oleh etnis Rakhine tersebut semakin hari bertambah buruk karena seolah-olah aksi yang dilakukannya mendapat dukungan dari pemerintah Myanmar.

Faktor selanjutnya adalah adanya rasa khawatir dan kecemburuan sosial. Dalam keadaan yang jauh dari kata layak, populasi etnis Muslim Rohingya mengalami peningkatan. Etnis Muslim Rohingya mengisi 40% bagian dari jumlah keseluruhan wilayah Rakhine. Hal tersebut menimbulkan rasa khawatir oleh etnis Buddha Rakhine jika suatu ketika nanti etnis Muslim Rohingya berhasil mendirikan negara sendiri dan mengeksploitasi seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah Rakhine. Rasa khawatir lainnya timbul karena *mindset* dari etnis Buddha Rakhine dan masyarakat Buddha Myanmar lainnya mengenai *Islamophobia* atau menganggap bahwa Islam merupakan agama radikal dan seringkali melahirkan ekstrimis yang membahayakan negaranya.

Kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Myanmar untuk menangani konflik etnis Rohingya tersebut tidak seharusnya menggunakan kekerasan dan mengutamakan kepentingan bersama karena pencapaian perdamaian dengan langkah-langkah

yang sesuai dengan nilai-nilai baik. Namun, adanya rasa mendominasi dari salah satu etnis membuat tindakan yang dilakukan dirasa benar. Hal tersebut terlihat pada pemerintah dan etnis Rakhine di Myanmar, keduanya merupakan pemeluk agama Buddha yang mendominasi di Myanmar sehingga menganggap benar segala sesuatu yang sudah dilakukannya terhadap etnis Rohingya yang merupakan minoritas Muslim di Myanmar.

Selanjutnya apabila dilihat dari Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dalam masyarakat, manusia tidak seharusnya dibeda-bedakan menurut etnis, ras dan agama. Berbanding dengan pemahaman mengenai HAM tersebut, pemerintah Myanmar dan etnis Buddha Rakhine memperlakukan etnis Rohingya dengan berbagai perlakuan buruk yang melanggar HAM. Diantaranya adalah penindasan dengan kekerasan yang berakhir pembunuhan massal atau genosida membuktikan bahwa etnis Rohingya kehilangan hak untuk hidup, kemudian kebijakan pemerintah untuk membersihkan etnis Rohingya atau *ethniccal cleansing* juga termasuk pelanggaran HAM, etnis Buddha Rakhine yang mendominasi di wilayah Rakhine membuktikan bahwa adanya diskriminasi atas etnis Rohingya yang memiliki keyakinan yang berbeda yaitu Islam.

Peran Indonesia dengan Organisasi Internasional dalam Menangani Konflik Rohingya.

Indonesia merupakan negara yang paling berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada korban konflik Rohingya. Indonesia memberikan bantuan kepada korban konflik dalam berbagai bentuk, antara lain adalah bantuan kemanusiaan

seperti bahan makanan seperti beras dan makanan balita, obat-obatan, pakaian. Selain bantuan kemanusiaan terdapat juga bantuan lain seperti sekolah darurat dan rumah sakit dan generator listrik. Bantuan yang diberikan oleh Indonesia tersebut juga sebagai bentuk tindak lanjut dari komunikasi intensif Indonesia kepada pemerintah Myanmar dalam upaya menangani konflik Rohingya (Kemlu RI, 29 Desember 2016). Upaya Indonesia melalui diplomasi multilateral diantaranya adalah dengan beberapa organisasi internasional seperti *United Nation of High Commissioner for Refugees* (UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi dan *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Upaya Indonesia untuk Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengupayakan beberapa cara untuk menangani konflik Rohingya. dalam konteks diplomasi, Indonesia melaksanakan diplomasi bilateral dengan pemerintah Myanmar. Selain itu, Indonesia melakukan diplomasi multilateral terhadap organisasi internasional. Sesuai dengan pengertian diplomasi multilateral menurut Freeman bahwa diplomasi melibatkan tiga atau lebih negara, terutama antar negara yang memiliki kepentingan yang sama dan ingin dicapai bersama. Indonesia melakukan diplomasi dengan organisasi internasional yang terdiri dari jumlah negara anggota yang banyak.

Contoh diplomasi multilateral yang pertama adalah Indonesia dengan UNHCR. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau biasa disebut UNHCR adalah sebuah organisasi di bawah PBB yang mengatasi persoalan

mengenai pengungsi. Tugas dari UNHCR berupa tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Sesuai dengan pendapat Freeman, Indonesia mempunyai kepentingan atas penanganan pengungsi yang datang ke Indonesia. Begitu juga dengan UNHCR merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang menangani mengenai pengungsi.

Mengetahui keadaan konflik Rohingya yang semakin buruk dan merasakan langsung dampaknya, pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya Indonesia mengenai jumlah pengungsi Rohingya yang berdatangan semakin meningkat, maka Indonesia bekerja sama dengan organisasi Internasional UNHCR untuk menanggulangi pengungsi.

Upaya Pemerintah Indonesia Terhadap OKI

Selain melakukan upaya terhadap UNHCR terkait dengan pengungsi dari etnis Rohingya yang memasuki Indonesia, pemerintah Indonesia juga melakukan diplomasi multilateral terhadap organisasi internasional lainnya yaitu Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. OKI merupakan organisasi internasional pemerintah atau International Governmental Organization (IGO). OKI atau biasa disebut Organization of Islamic Cooperation (OIC) terdiri dari 57 negara anggota yang tersebar di empat benua di dunia. (OIC, https://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en).

Indonesia menjadi negara anggota Organisasi Kerja sama Islam mulai pada tahun 1969. Indonesia aktif menghadiri berbagai pertemuan

internasional yang diselenggarakan oleh OKI. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di Asia, Indonesia kerap mengutarakan suaranya untuk mendorong OKI dalam mengupayakan resolusi untuk suatu negara yang berkonflik. Pemerintah Republik Indonesia juga menyuarakan dukungannya dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Mengingat adanya isu *Islamophobia* di dunia, Indonesia mendorong OKI untuk meluruskan kesalah pahaman sudut pandang dunia barat atau negara non-Islam terhadap Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai salah satu upaya Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik Rohingya yaitu diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap OKI. Sehubungan dengan adanya konflik kemanusiaan berkepanjangan di Myanmar yaitu konflik etnis Muslim Rohingya, maka pada Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja sama Islam (KTT OKI) pada tanggal 10 September 2009 di Astana, Kazakhstan, Indonesia mendorong OKI untuk melakukan upaya nyata dalam penyelesaian konflik Rohingya. Terkait hal tersebut organisasi internasional yang berbasis Islam tersebut menawarkan kerja sama kepada Indonesia untuk bersama-sama berperan dalam penyelesaian konflik Rohingya (Liputan6, 2017).

Terdapat *Deputy Secretary General Organization of Islamic Cooperation (Sec. Gen OIC)* urusan politik yaitu *Director for Moslem Minority Communities* yang menangani konflik Rohingya. Terdapat tiga negara anggota OKI yang aktif berkontribusi dalam penyelesaian konflik Rohingya ini yaitu Indonesia, Bangladesh dan Malaysia serta terdapat negara anggota OKI yang juga aktif

memberikan bantuan tetapi tidak terkena dampaknya yaitu Turki (wawancara dengan Andika Bambang Supeno, pada 10 Agustus 2018).

Kemudian mengenai pemerintah Myanmar yang tidak mengizinkan adanya campur tangan asing dalam proses penyelesaian konflik etnis Rohingya tersebut. Kebijakan dari pemerintah Myanmar tersebut membuat OKI sulit untuk masuk ke Myanmar. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN sekaligus negara anggota OKI yang memperoleh kepercayaan dari pemerintah Myanmar untuk turut berpartisipasi dalam rangka menangani konflik Rohingya. Kepercayaan tersebut diperoleh Indonesia karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk menangani konflik Rohingya tersebut tidak pernah menggunakan kekerasan dan kekerasan. Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan secara *Constructive Engagement* sebagai upaya dalam menangani konflik berkepanjangan ini (wawancara dengan Andika Bambang Supeno, pada 10 Agustus 2018).

Salah satu contoh *constructive engagement* yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Myanmar adalah resolusi 4+1. Proposal mengenai strategi penyelesaian konflik Rohingya yang diberi nama resolusi 4+1 oleh Indonesia kepada pemerintah Myanmar. Isi resolusi tersebut antara lain adalah memulihkan stabilitas dan keamanan, menahan diri dan tidak melakukan kekerasan, perlindungan atas semua orang di Rakhine tanpa memandang ras dan agama, pentingnya akses langsung untuk bantuan manusia, serta implementasi dari pentingnya rekomendasi yang tercatat dalam Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang

dipimpin oleh Kofi Annan. Resolusi tersebut terangkum dalam dokumen "*Organization of Islamic Cooperation (OIC) Chairman's Summary Report of the Meeting of Head of State and Government on the Rohingya Muslims Community in Myanmar*" (Kemlu RI, 11 September 2017).

Pada tahun 2012 ketika meletusnya konflik etnis Rohingya yang menyebabkan krisis kemanusiaan karena adanya pembantaian secara besar-besaran. Dalam pertemuan keempat Konferensi Tingkat Tinggi di Mekkah, Indonesia mendorong OKI untuk menetapkan agenda khusus dan langkah yang nyata untuk menyelesaikan permasalahan umat beragama secara umum. Indonesia juga mendorong OKI untuk segera menempuh langkah-langkah yang bersifat konstruktif terhadap etnis Rohingya.

Sebagai hasil dari diplomasi multilateral Indonesia tersebut OKI mulai bersikap. OKI mulai memiliki peran dalam konflik etnis ini, antara lain adalah mendorong negara-negara anggotanya untuk melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar, mengirimkan delegasi sebagai perwakilan yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta mengenai kondisi di Rakhine terkait konflik etnis tersebut, memberikan bantuan dana untuk mendukung proses demokratisasi Myanmar.

Indonesia mendorong OKI untuk melakukan pendekatan *constructive engagement* dalam melakukan upaya penyelesaian konflik Rohingya. *Constructive engagement* yang memiliki arti keterlibatan konstruktif, yang menekankan konsensus dan menghindari konfrontasi dengan semangat inklusif dan persuasif perhatian. Dengan kata lain, keterlibatan konstruktif ini merupakan

upaya pendekatan pada suatu konflik dengan menggunakan cara-cara yang bersifat *soft diplomacy* dan tanpa kekerasan agar tercapai perdamaian abadi.

Dorongan Indonesia kepada OKI untuk melakukan pendekatan secara konstruktif tersebut sulit untuk dapat dilaksanakan oleh OKI. Karena sikap yang diambil oleh OKI merupakan hasil suara dari negara-negara anggota yang cenderung mengecam, mengutuk dan penyampaian dialog keras kepada Myanmar. Negara anggota OKI memiliki kepentingan yang berbeda-beda atas konflik Rohingya hal tersebut menentukan sikap yang diambil dari masing-masing negara tersebut. Sampai pada saat ini dari jumlah 56 negara anggota OKI (selain Indonesia) hanya terdapat 5 negara yang mendukung sikap Indonesia menggunakan cara-cara konstruktif atau dengan istilah pendekatan *constructive engagement*. Kelima negara tersebut antara lain adalah Arab Saudi, Mesir, Bangladesh, Turki dan Djibouti.

Selain dukungan yang diperoleh dari kelima negara tersebut, pemerintah Indonesia melalui Wakil Ketua DPR RI melaksanakan pertemuan yang disebut dengan *courtesy call* dengan Iran yang diwakili oleh ketua parlemennya. Pertemuan tersebut dilaksanakan disela-sela pelaksanaan Konferensi ke-13 Uni Parlemen Negara-negara Anggota OKI. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah agar Indonesia mendukung upaya Indonesia dalam menangani konflik Rohingya, kemudian Indonesia juga menyampaikan supaya Iran turut berperan sebagai negara anggota OKI dalam upaya penanganan konflik Rohingya. Pada 19 Januari 2017, dikeluarkan *Draft Final Communiqué Extraordinary Session of The OIC*

Council of Foreign Ministers (CFM) On The Situation of The Rohingya Muslim Minority In Myanmar di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hingga pada saat ini Indonesia masih terus melakukan komunikasi intensif dengan negara anggota OKI melalui perwakilan-perwakilan Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mengamati mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan OKI sebagai indikator keberhasilan diplomasi Indonesia.

Diplomasi Indonesia kepada OKI untuk menangani konflik Rohingya menjadi sulit dan *crucial*. Sulit karena Indonesia harus mencari cara untuk tercapainya satu suara yang bulat atas sikap OKI terhadap penanganan konflik Rohingya ini. Karena masing-masing negara anggota mempunyai sikap yang berbeda atas konflik Rohingya. Kemudian menjadi *crucial* atau sangat penting karena mengingat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki akses masuk yang sangat mudah ke Myanmar dan memperoleh kepercayaan dari pemerintah Myanmar sehingga Indonesia bisa menjadi jembatan bagi OKI untuk mengimplementasikan berbagai upaya sebagai bentuk resolusi konflik dari konflik Rohingya.

Pada saat ini, bentuk kerja sama Indonesia terhadap OKI untuk menangani konflik Rohingya masih dalam proses. Mengingat adanya rencana OKI untuk membentuk sebuah komite yang bernama "*Commission in Crimes Against Rohingya*" yang tidak disetujui oleh Myanmar sehingga membuat Indonesia masih harus terus berupaya untuk melakukan diplomasi kepada OKI untuk dapat mengakomodir pihak-pihak yang terkait dengan OKI yaitu negara-negara anggota OKI dan pemerintah Myanmar.

Jika dianalisis menggunakan sudut pandang dari diplomasi multilateral terlihat bahwa Indonesia melakukan diplomasi dengan organisasi internasional yang di dalamnya terdiri dari jumlah negara anggota yang banyak dengan tujuan yang sama yaitu menangani konflik Rohingya. Sesuai dengan kekuatan dari diplomasi multilateral menurut White, yaitu ruang lingkup diplomasi lebih luas, menghilangkan pengkotakan, kemudian terciptanya legitimasi yang kuat karena diperoleh berdasarkan dari suara-suara banyak negara sehingga bersifat mengikat. Dalam hal ini, tujuan Indonesia adalah mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota OKI mengenai pendekatan *constructive engagement* yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani konflik Rohingya. Dukungan yang didapatkan sebagai hasil diplomasi multilateral tersebut akan menciptakan legitimasi yang kuat dan luas sehingga dapat diimplementasikan secara maksimal.

Selain melakukan diplomasi secara terbuka terhadap OKI, Indonesia juga melakukan lobi-lobi terhadap negara anggota OKI untuk mencapai tujuan Indonesia dalam memperoleh dukungan yang semakin banyak dan menjadi kuat. Kemudian Indonesia juga melakukan komunikasi intensif terhadap perwakilan negara Republik Indonesia yang berada di negara anggota OKI dengan tujuan untuk mengetahui sikap OKI yang tetap *concern* atas penanganan konflik Rohingya (wawancara dengan Andika Bambang Supeno, pada 5 Agustus 2018)

Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap OKI belum bisa berjalan lancar karena adanya beberapa kendala yang ditemui. White mengatakan bahwa selain memiliki kekuatan, diplomasi multilateral juga memiliki kelemahan yaitu adanya

kepentingan yang berbeda dari masing-masing negara menentukan sikap yang akan diambil juga dapat menimbulkan konflik baru, waktu dan proses yang harus dilalui panjang karena harus mengakomodir banyak negara, efisiensi penyampaian kepentingan yang rendah karena jumlah negara yang banyak. Dalam hal ini, masing-masing negara anggota OKI mempunyai kepentingan yang berbeda atas Rohingya sehingga sikap dari negara tersebut juga akan berbeda.

Sebagai contoh Indonesia melakukan upaya-upaya konstruktif terhadap pemerintah Myanmar karena Indonesia menggunakan landasan ideologi Pancasila yang mengedepankan *soft diplomacy* dan anti kekerasan, sedangkan terdapat beberapa negara OKI yang melakukan dialog keras, kecaman dan hal-hal yang bersifat keras lainnya. Tidak mudah untuk menyatukan sikap dikarenakan OKI terdiri dari banyak negara anggota sehingga sulit untuk mengakomodir menjadi satu suara dan mendapatkan dukungan atas sikap Indonesia yang menggunakan pendekatan *constructive engagement*.

Kemudian apabila dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, diplomasi Indonesia terhadap OKI dalam menangani konflik Rohingya ini dilandasi dengan adanya rasa empati atas tindakan pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Muslim Rohingya. *Ethnical Cleansing* yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar merupakan tindakan yang membuat etnis Rohingya kehilangan hak untuk hidup yang pada dasarnya dimiliki oleh seluruh umat manusia.

Kemudian sesuai dengan HAM menurut sudut pandang Yozo Yokota, bahwa setiap manusia memiliki hak-hak tanpa dibedakan ras, agama, kebudayaan serta kebangsaannya. Konflik yang terjadi di Myanmar

tersebut merupakan konflik etnis yang berujung dengan tindakan diskriminasi terhadap suatu etnis yang pada kasus ini adalah etnis Muslim Rohingya oleh etnis Buddha.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk membantu etnis Rohingya ini mendapatkan perlakuan yang layak dan memperoleh kembali hak-hak dasar yang sudah melekat pada diri etnis Muslim Rohingya. Indonesia menggunakan pembukaan UUD 1945 terutama pada alinea pertama dan keempat serta Pancasila sebagai landasan bagi untuk memperjuangkan hak-hak asasi etnis Muslim Rohingya melalui upaya diplomasi multilateral terhadap OKI.

Hingga pada saat ini pemerintah Indonesia masih berusaha untuk mendorong OKI dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya. Meskipun, pemerintah Myanmar tetap mempertahankan kebijakan atas kewarganegaraan Rohingya dan *ethnic cleansing* terhadap etnis

D. PENUTUP

.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai diplomasi multilateral Indonesia terhadap OKI dalam menangani konflik Rohingya. Diperoleh kesimpulan bahwa Indonesia sebagai negara tetangga dalam kawasan Asia Tenggara, adanya persamaan agama Islam dan merasakan dampak dari konflik Rohingya secara langsung. Menyebabkan Indonesia ikut berperan dalam upaya menangani konflik Rohingya.

Rohingya. Kemudian diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap OKI dapat dikatakan cukup sulit karena Indonesia harus mengakomodir seluruh negara anggota organisasi tersebut yang berjumlah 56 negara. Maka implementasi diplomasi multilateral Indonesia terhadap OKI dapat dikatakan belum maksimal.

Langkah kebijakan OKI yang cenderung keras dan mengecam pemerintah Myanmar mengenai konflik Rohingya menyebabkan pemerintah Myanmar sulit untuk menerima kehadiran dari OKI. Maka Indonesia dalam diplomasinya bertujuan untuk mendorong sikap OKI untuk menggunakan *soft power* sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Bentuk diplomasi Indonesia terhadap OKI saat ini adalah upaya membulatkan suara dari negara-negara anggota agar OKI dapat memperjuangkan hak asasi manusia etnis Muslim Rohingya dengan menggunakan pendekatan *constructive engagement*.

Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap OKI merupakan diplomasi multilateral. Tujuan Indonesia melakukan diplomasi terhadap OKI adalah supaya tercapainya legitimasi kebijakan atas konflik Rohingya yang kuat, luas dan mengikat dalam menangani konflik Rohingya dengan menggunakan pendekatan *constructive engagement*. Diplomasi multilateral Indonesia terhadap OKI tersebut memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang sudah seharusnya melekat pada setiap manusia dalam hal ini etnis Muslim Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Tiara D. 2016. Hal 127. Vol 2. No 2. *Peran Organisasi Kerja sama Islam dalam Menangani Konflik Rakhine-Rohingya di Myanmar Tahun 2012-2013*. Diakses dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, pada 7 April 2018 pukul 19.34 WIB.
- BBC Indonesia. 5 September 2017. *Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya dan Enam Hal Lain yang Harus Anda Ketahui*. Diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698>, pada 13 Februari 2018 pukul 10.29 WIB
- Deutsche Welle. 4 September 2017. *Rohingya: Apa yang Perlu Diketahui?*. Diakses dari <https://www.dw.com/overlay/media/id/rohingya-di-myanmar-apa-yang-perlu-diketahui/40343623/40557421> , pada 4 Agustus 2018 pukul 15.56 WIB
- Deutsche Welle. 30 Oktober 2017. *Bocah Rohingya: Diperkosa, Diculik dan Ditelantarkan*. <https://www.dw.com/id/bocah-rohingya-diperkosa-diculik-dan-ditelantarkan/g-41170221> , pada 8 Agustus 2018 pukul 13.11 WIB
- Fithriansyah, Helmi. 11 September 2017. *JK : OKI dan RI Akan Kerjasama Tangani Rohingya*. <https://www.liputan6.com/news/read/3089600/jk-oki-dan-ri-akan-kerjasama-tangani-krisis-rohingya>, pada 21 Februari 2018 pukul 12.09 WIB
- Fasha, Nabila. 2017. Vol 4. Hal 1288. *Dampak Pengusiran Etnis Rohingya Oleh Myanmar Terhadap Keamanan Bangladesh*. Diakses dari [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/eJournal%20-%20Fasha%20Nabila%20Yasid%20\(11-01-17-06-26-01\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/eJournal%20-%20Fasha%20Nabila%20Yasid%20(11-01-17-06-26-01).pdf), pada 2 Agustus 2018 pukul 13.38 WIB
- Hartati, Ana Y. 2013. Vol 2. No 1. Hal 11. *Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar*. Diakses dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/297/346> pada 18 Juli 2018 pukul 19.08 WIB
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2017. *Indonesia Urges OIC Cooperation for a Solution to the Myanmar Problem*. <https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Indonesia-Urges-OIC,-Cooperation-for-a-Solution-to-the-Myanmar-Problem.aspx> . diakses pada 15 Juli 2018 pukul 14.09
- Mitzy, I Gulia. 2014. Hal 154. Vol 2. No 1. *Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar*. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/globalsouth/article/download/28836/17362>, pada 2 Agustus 2018 pukul 12.32 WIB
- Rahma, Zinda. 2016. *Ambiguitas Sikap Politik Aung San Suu Kyi Terhadap Masalah Segregasi Etnis Rohingya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. Diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/36158/> pada 30 Maret 2018 pukul 00.16 WIB
- Rosa, Aulia. 2018. Hal 183. Vol 5. No 1. *The Crime of Genocide on the Rohingya Ethnic on Myanmar from the Prespective of International Law and Human Rights*. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/15110/8069>, pada 06 Agustus 2018 pukul 17.45 WIB

- Sawal, Indah A. 2018. *Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingya Di ASEAN*<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25716/SKRIPSI%20FIXXXX.com> . Pada 07 Agustus 2018 pukul 13.29 WIB
- Turangan, Doortje. 2011. Hal 5-6. *Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Diakses dari<http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/225> , pada 4 Agustus 2018 pukul 14.21 WIB
- Ula, Syaifatul. 2017. Hal 19. Vol 3. No 3. *Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar*. Diakses dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, pada 23 Mei 2018 pukul 16.18 WIB
- Waluyo, Tri Joko. 2012. Vol 4. No 2. *Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar*. Diakses dari <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/issue/view/157>, pada 3 Agustus 2018 pukul 15.45 WIB